

RINGKASAN

PERTARUNGAN POLITIK DAN KEBERPIHAKAN PRODUK HUKUM Studi Deskripsi Persaingan Gagasan dalam Menyusun dan Menetapkan UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu

Wawan Kokotiasa

Studi ini mengkaji tentang bagaimana pertarungan kepentingan dalam menyusun Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2003 mengenai Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dengan asumsi bahwa setiap produk hukum menurut pandangan *das sein* hakekatnya merupakan 'produk politik' dari konfigurasi politik dominan dalam relasi kuasa.

Pada dasarnya, konfigurasi politik yang menyusun UU Pemilu No. 12 Tahun 2003 sangat berkepentingan atas aturan main (sistem pemilu) yang mengatur persaingan/kompetisi mereka pada pemilu 2004. Dengan cara mempengaruhi regulasi pemilu, berarti kepentingan politik yang bersaing telah merintis/membangun arena yang akan mereka pakai dalam pertarungan pada pemilu berikutnya.

Secara spesifik studi ini ingin melihat pada dimensi pertarungan kepentingan di tingkat legislasi hingga menghasilkan UU Pemilu berikut implikasi politiknya. Sebab faktor regulasi yang diproduksi di tingkat legislasi oleh konfigurasi kekuasaan sebelumnya akan menentukan format politik berikutnya, disamping faktor dinamika politik yang berkembang di masyarakat dan situasi politik global.

Produk hukum yang dihasilkan konfigurasi politik hasil pemilu 1999 yakni UU No 12 Tahun 2003 tentang Pemilu, tidak lepas dari *vested interest* partai-partai politik dalam perumusan, penyusunan dan penetapannya. Implikasinya, penetapan UU Pemilu tersebut di DPR mengalami beberapa kali penundaan, akibat tarik-ulur kepentingan kekuatan politik yang ada di lembaga legeslatif itu. Sehingga UU Pemilu yang ditetapkan oleh DPR pada tanggal 18 Pebruari 2003 itu mengandung pasal-pasal yang bersifat kontroversial dan konfliktual. Bahkan substansi UU Pemilu tersebut melahirkan sebuah sistem pemilu yang kurang lazim berlaku di berbagai negara.

Karena itu penelitian ini ingin mengetahui bagaimana pertarungan politik yang bercokol di tampuk kekuasaan dalam menyusun dan menetapkan produk hukum yang dilahirkannya yakni UU No. 12 Tahun 2003 tentang pemilu. Bagaimana persaingan gagasan di tingkat legislasi dalam

memproduksi UU No. 12 Tahun 2003 mulai Draf RUU Pemilu versi Depdagri hingga ditetapkan menjadi UU Pemilu oleh DPR.

Dengan menelaah secara kritis dasar hukum pelaksanaan pemilu Orde Baru makin menguatkan bukti bahwa faktor regulasi yang diproduksi rejim menentukan format politik pada era berikutnya. Dengan kata lain UU Pemilu dimanfaatkan untuk turut melanggengkan kekuasaan. Menggunakan perspektif kritis tentang relasi hukum dan kekuasaan dan pandangan Foucault mengenai pengetahuan/kekuasaan, penelitian ini berhipotesa bahwa pada proses penyusunan, penetapan dan implementasi UU Pemilu ada pengaruh kekuasaan yang bekerja hingga menguntungkan (berpihak) pada anasir politik tertentu.

Tipe studi ini memakai metode penelitian deskriptif dengan paradigma kualitatif – historis. Pelaksanaan tipe dan metode penelitian ini tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisa dan interpretasi tentang arti data itu. Sebagaimana diungkapkan oleh John W. Creswell: *qualitative research is interpretative research*. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan penelitian kepustakaan atau *library research*. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis wacana (*discourse analysis*).

Berdasarkan hasil analisa, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: *Pertama*, secara tekstual RUU pemilu versi Depdagri sulit untuk dideteksi apakah merupakan hasil pertarungan kepentingan antara kekuatan politik yang sedang bercokol di tampuk kekuasaan. Studi ini melihat pertarungan yang nyata dalam mempengaruhi produk hukum (UU Pemilu) justru terjadi di DPR. Sebab lembaga perwakilan rakyat tersebut merupakan miniatur kompetisi dan dominasi dalam arena legislasi dari kekuatan politik yang sedang bersaing di ranah kekuasaan legeslatif. Hasil penelitian ini juga tidak menemukan KPU sebagai pelaksana UU pemilu berpihak pada anasir kekuatan politik tertentu. Institusi yang bersifat tetap, nasional dan mandiri ini bekerja pada wilayah teknis operasional dan bersifat non-politis. Meski tak dapat dipungkiri bahwa ada jaring-jaring kekuasaan yang mempengaruhi sejumlah kebijakannya, namun pada dataran normatif sulit untuk dibuktikan lembaga ini telah berpihak pada parpol tertentu.

Kedua, UU Pemilu No. 12 Tahun 2003 ini dengan segala konsekuensi sistem pemilu yang disandangnya memberi keuntungan maksimal pada parpol menengah dengan sebaran pemilih relatif merata terutama di Luar Jawa, yakni: PAN dan Partai Demokrai. Keberpihakan produk hukum ini dilihat dalam konteks perbandingan perolehan suara sah dengan jumlah kursi yang didapat di parlemen sebagai implikasi penentuan daerah pemilihan, jumlah kursi dan rumus bilangan pembagi pemilihan. Tentu saja ada faktor lain diluar regulasi yang ikut mendongkrak perolehan kursi parpol, seperti popularitas figur/tokoh, bekerjanya mesin politik, jaringan parpol yang luas, namun sistem pemilu sebagai derivasi UU Pemilu memiliki andil yang

signifikan bagi perolehan suara dan kursi parpol. Dan pada dataran tertentu dapat kita kategorikan sebagai produk hukum yang bepihak pada kekuatan politik yang sedang bersaing. Karena itu penelitian ini juga memberikan sejumlah rekomendasi untuk merevisi sejumlah pasal kontroversial dan konfliktual guna mendapatkan sistem pemilu yang paling ideal untuk Indonesia kedepan.



SUMMARY

POLITICAL CONFLICT AND POSITION OF LAW PRODUCT Description Study about Ideas Struggle on Arrange and Determinate UU No. 12 Th 2003/General Election

Wawan Kokotiasa

The research observe the battle of interest on the conduct of the 12th Laws 2003 explained General Election for People's Representatives Council (DPR), Regional Representatives Council (DPD), and Provisional Representatives Council (DPRD). The assumption for the research, in substance, every law is 'political product' of dominant political configuration in the power relation.

Basically, the political configuration conceive the law, has interest in most to rule of competition in the 2004 General Election. The rule gets influence the political parties' interests that want to conquer the arena of the next election running.

The research specifies to focus the conflict of interest in legislature until the Law signed including the political effect. In fact, regulation factor in legislature will configure the next political form, beside current dynamics of politics and current international politics.

The politician who elected in 1999 election produces the 12th Law 2003. The process never vacuums from party's vested interest. The struggle occurs during collecting process, combining process, and concluding process the law. In this case, the law has delayed several times, because all parties could not deal in an interest. So, after the law signing on 18th February 2003 still left some controversial and conflicts in some topics. Even, the substance of the law deliver a rare system of election when compare to other countries.

The research want to find out how the struggle occurring on the executive when processing the law. How the ideas conflict in legislature, since the draft until the definitive law.

The critical analysis of election under The New Order regime gave more evidence that the regulation factor in legislature will configure the next political form. In other word, the law uses to take advantage for continuing the regime. Foucault's critic perspective in relation between law and power, uses to get hypothetical sentences. The power influence exists during combining process, concluding process, and implementing process of the Law, until give advantage to a political interest.

The research uses descriptive research method with histories-qualitative paradigm. Not only capturing collecting and data, but also analyzes and interpreting the meaning of data. As John W. Creswell said that qualitative research is interpretative research. The technique of

collecting data will use library research. The technique of analyzing data will use discourse analyzes.

According to analyzes result, the conclusion are First, the draft election from difficult to detect the power struggles in top of the executive. The struggle occurs in the People's Representatives Council (DPR), because it showed the miniature of represent domination and competition in the body of legislature. The research doesn't find the evidence that the General Election Commission (KPU) as the election organizer was cheating to one or many parties. KPU has known as determinant, national and independent work as technical operational and non-political institution. Although, it could be denied that the power network influence several KPU's strategies, but it could not prove the institution was cheating to some parties.

Second, the 12th Law 2003 gives maximum votes to middle political parties with average spreading constituent on outside Java: National Mandatory Party (PAN) and Democrat Party (PD). In other words, the law gives disadvantages to other parties, on the opponent. The advantage can be shown in comparing the valid vote and the number of elected legislator. It comes from the effect of election district making, number of legislator, and equation number of vote. Of course, there is another factor to increase elected legislator, we can mention: popularity figure of leader, effectively organized structural party, widely political party network, but the system of election significantly increasing the vote. Also, the research gives some recommendations for the revision controversial and conflicts chapter or below, to achieve the most ideal Indonesia's general election beyond.



ABSTRACT

POLITICAL CONFLICT AND POSITION OF LAW PRODUCT Description Study about Ideas Struggle on Arrange and Determinante UU No. 12 Th 2003/General Election

Wawan Kokotiasa

The assumption for the research, in substance, every law is 'political product' of dominant political configuration in the power relation. Basically, the political configuration conceive the law, has interest in most to rule of competition in the 2004 General Election. The rule gets influence the political parties' interests that want to conquer the arena of the next election running. The research specifies to focus the struggle of interest in legislature until the Law signed including the political effect. In fact, regulation factor in legislature will configure the next political form.

The 1999 elected politician produces the 12th Law 2003. The process never vacuums from party's vested interest. The struggle occurs during collecting process, combining process, and concluding process the law. In this case, the law has delayed several times, because all parties can't deal in an interest. So, after the law signing on 18th February 2003 still left some controversial and conflicts in some topics.

The critical analysis of election under The New Order regime gives more evidence that the regulation factor in legislature will configure the next political form. In other word, the law uses to take advantage for continuing the regime. Foucault's critic perspective in relation between law and power, uses to get hypothetical sentences. The power influence exists during combining process, concluding process, and implementing process of the Law, until give advantage to a political interest.

According to analyzes result we has conclusion. First, the draft election from difficult to detect the power struggles in top of the executive. The struggle occurs in the People's Representatives Council (DPR), because it show the miniature of represent domination and competition in the body of legislature. The research doesn't find the evidence that the General Election Commission (KPU) as the election organizer cheating to one or many parties. KPU has known as determinant, national and independent work as technical operational and non-political institution.

Second, the 12th Law 2003 gives maximum votes to middle political parties with average spreading constituent on outside Java: National Mandatory Party (PAN) and Democrat Party (PD). In other words, the law gives disadvantages to other parties, on the opponent. The advantage can be shown in comparing the valid vote and the number of elected legislator. It comes from the effect of election district making, number of legislator, and equation number of vote. Of course, there is another factor to increase elected legislator, we can mention: popularity figure of leader, effectively

organized structural party, widely political party network, but the system of election significantly increasing the vote.

Key words: *political conflict, position of law product, general election.*

